



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh pabrik, warganegara Indonesia, tempat tinggal di , Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan dahulu supir angkot, warganegara Indonesia, tempat tinggal dahulu di , Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia.** selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah meneliti bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Desember 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G / 2018/PA.Lpk pada tanggal 17 Desember 2018 dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA .Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 12 Desember 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan xxxx Kabupaten Mandailing Natal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/03/XII/2014 tertanggal 12-12-2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Penyabungan selama 5 bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan Tanjung Selamat, Gg. Musholla, Dusun IV, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir 07-01-2016, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun sejak tanggal 21 Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman dengan alasan pergi ke kampung halaman untuk mengambil sepeda motor, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kekediaman hingga saat ini;
4. Bahwa akibatnya sejak tanggal 21 Januari 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/1486/XII/TS/2018 tertanggal 07 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan Penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 2 tahun 11 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA .Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

6. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, poberada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara inpeson di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diapnggil secara resmi dan patut melalui mass media (Pengumuman) melalui Radio Hapsari fm Kabupaten Deli Serang sebanyak 2 (dua) kali panggilan pertama tanggal 19 Desember 2018 dan kedua tanggal 21 Januari 2019 masing-masing untuk persidangan tanggal 29 April 2019, ternyata ketidakhadiran Tergugat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA .Lpk



tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor . xxx/03/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 12 Desember 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama : Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dame, Gang Baru Nomor 19 A Lingkungan 14 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember tahun 2014 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tanjung Selamat Gang Mushalla Dusun IV, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tanggal 21 Januari 2016 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Penggugat maupun pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukannya;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Jalan Tanjung Anom, Gang Tampok Nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Ayah Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember tahun 2014 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tanjung

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA .Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Gang Mushalla Dusun IV, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tanggal 21 Januari 2016 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

- Penggugat maupun pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukannya;

- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA .Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pasal 154 ayat 1 RBg Jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang 7 tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 21 Januari 2016,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA .Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sampai sekarang ini tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal atas nama Mahrani Zulfah Caniago sebagai Penggugat dan Choiruddin sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA .Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mega Wahyuni Binti Zulfahmi dan Zulfahmi Bin Zulkarnaini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama : Mega Wahyuni Binti Zulfahmi dan Zulfahmi Bin Zulkarnaini menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 21 Januari 2016 dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukannya, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama : Mega Wahyuni Binti Zulfahmi dan Zulfahmi Bin Zulkarnaini saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA .Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 21 Januari 2016 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 21 Januari 2016 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 angka (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 angka (2) .Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA .Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 21 Januari 2016 maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menjatuhkan *talak satu bain sughra Tergugat* terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat : Segala Peraturan Per undang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syara'I yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Mahrani Zulfah Caniago Binti Zulfahmi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh **H. M. Thahir, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA .Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. M. Thahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

H. M. Thahir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	
-----			30,000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	
-----			50,000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	300,000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	10.000,00
5.-----	Meterai.....	Rp.	<u>6.000,00</u>

Total biaya Perkara Rp. 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA .Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

